

RENCANA AKSI OPD DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. Susilo No. 44-46 Pahoman Bandar Lampung**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Aksi Kegiatan – OPD merupakan penjabaran secara rinci dari Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan & kinerja, alokasi pembiayaan, jadwal /waktu pelaksanaan serta petugas/unit kerja sebagai penanggung jawab masing-masing kegiatan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan terorganisir dengan baik sehingganya dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, yaitu efektif dan efisien.

Proses penyusunan Rencana Aksi ini di buat berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan melibatkan seluruh unsur pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG**



Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes

Pembina Utama Madya
NIP.19630625 198910 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
B. Sumber Daya	6
C. Anggaran	6
D. Sarana Pendukung	7
E. Kinerja Pelayanan	7
BAB III RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018	
A. Visi dan Misi	11
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	12
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	12
D. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021	14
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan optimal untuk mewujudkan upaya pencapaian kinerja pembangunan kesehatan di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, perlu disusun Rencana Aksi masing-masing kegiatan

Rencana aksi merupakan penjabaran secara rinci dan terjadwal atas rencana kinerja yang menjadi tujuan dan sasaran kinerja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang memuat gambaran rencana kinerja per triwulan selama satu tahun.

Sebagaimana Renstra OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 bahwasanya kinerja yang akan dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meliputi dari 4 program prioritas dengan 11 kegiatan+32 sub kegiatan dan 1 program penunjang dengan 7 kegiatan+57 sub kegiatan yang kesemuanya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan menuju perbaikan status kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung.

Penyusunan rencana aksi dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja OPD sehingga upaya pencapaian kinerja lebih terarah dan terukur yang selanjutnya dapat memudahkan proses monitoring evaluasi.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Aksi OPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah untuk mendokumentasikan penjabaran rencana aksi berdasarkan sasaran kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2021 di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan rencana aksi ini membahas tentang gambaran umum OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berikut tugas fungsi dan struktur organisasi OPD, visi misi dan tujuan sasaran pelayanan OPD serta rencana kinerja yang akan dilaksanakan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2009 yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas maka Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

Fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 tahun 2019 sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi pelaporan;
2. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan ;
3. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
4. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur;

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut diatas, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki struktur (terlampir) sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Pelayanan Kefarmasian;
6. Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan, membawahi;
 - 1) Seksi Penyusunan Program Kesehatan
 - 2) Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

B. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya berjumlah 410 orang yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 38 orang dan 372 pejabat fungsional, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung & UPTD Tahun 2021

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
DINAS KESEHATAN				
PNS : 363	S3 : 1	IV d : 1	Eselon II : 1	Administrator Kesehatan : 6
L : 119	S2 : 82	IV c : 1	Eselon III : 8	Sanitarian : 6
P : 244	S1 : 125	IV b : 6	Eselon IV : 23	Epidemiologi muda : 3
	D4 : 17	IV a : 40		Entomolog : 1
PTHL : 198	D3 : 86	III d : 64		Kesehatan Kerja : 1
L : 84	D2 : 0	III c : 63		Jumlah : 17
P : 114	D1 : 1	III b : 81		
	SLTA : 35	III a : 26		
	SLTP : 4	II d : 45		
	SD : 3	II c : 23		
		II b : 8		
		II a : 3		
		I d : 1		
		Ic : 1		
		Ib : 0		
		Ia : 0		
JUMLAH DINKES	363	363	32	363

C. Anggaran

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2021 sebesar:

APBD : Rp. 279.893.967.475

APBN : Rp. 35.499.287.000

Total : Rp. 315.393.254.475

Tabel 2.2 Rincian alokasi anggaran tersebut sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Anggaran		Total Anggaran
		APBN (Rp)	APBD (Rp)	
1	Bidang Pelayanan Kesehatan	2.575.072.000	162.695.171.331	165.270.243.331
2	Sekretariat + 4 UPTD	1.069.977.000	60.610.501.380	61.680.478.380
3	Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit	16.345.035.000	6.986.299.000	23.331.334.000
4	Bidang Kesmas	12.202.459.000	9.419.764.991	21.622.223.991
5	UPTD Labkes	-	17.366.841.600	17.366.841.600
6	UPTD RSBNH	-	15.974.569.520	15.974.569.520
7	UPTD Bapelkes	3.057.373.000	2.564.039.800	5.621.412.800
8	Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan	249.371.000	2.106.731.553	2.356.102.553
9	UPTD IFKA	-	2.170.048.300	2.170.048.300
JUMLAH		35.499.287.000	279.893.967.475	315.393.254.475

D. Sarana Pendukung

Adapun sarana pendukung dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meliputi :

Bangunan Kantor : 2 unit

Kantor UPTD : 4 unit kerja (Bapelkes, Labkesda, Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Kesehatan, RS Bandar negara Husada)

Serta sarana prasarana perlengkapan dan peralatan kantor lainnya seperti : sarana Meubelair, alat pengolah data, dan beberapa kendaraan operasional dan RS keliling.

E. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan target kinerjanya dan target RPJMD dan Perjanjian Kinerja 2020, ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2020	Realisasi 2020
1	Menurunnya kasus kematian Ibu	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	130 Kasus	106 Kasus
2	Menurunnya kasus kematian Bayi	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	600 Kasus	506 Kasus
3	Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi stunting	Persen	25,18	26,26
4	Menurunnya kasus kesakitan	Angka Keberhasilan pengobatan TB Paru (<i>success rate</i>)		90	98

Dari 4 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 telah mencapai target, untuk penurunan kasus kematian ibu dan bayi menunjukkan adanya perbaikan kinerja.

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Indikator Program (IKP) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung & UPTD tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	Capaian (%)
				2020	2020
1.	Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	% Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	30	52
2.	Meningkatnya mutu pelayanan bapelkes	Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Bapelkes terakreditasi	100	Perhitungan dalam satu tahun
3.	Tersedianya anggaran kesehatan terhadap APBD	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	% Anggaran Kesehatan terhadap APBD	10	9,18

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	Capaian (%)
				2020	2020
4.	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan administrasi perkantoran	100	89,30
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor	100	94,61
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah lembaga yang dibina	5	15 Kabupaten/ Kota
7.	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	100	90,40
8.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	% FKTP terakreditasi	50	97,28
9.	Meningkatnya mutu pelayanan IFKA	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	Pelayanan IFKA sesuai standar	100	98,80
10.	Meningkatnya mutu pelayanan RSBNH	Program Pelayanan RSBNH	RSBNH terakreditasi	100	94,75
11.	Meningkatnya mutu pelayanan Labkesda	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Labkesda terakreditasi	100	93,20
12.	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dalam promotif dan preventif	Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi <i>wasting</i>	9,27	71,32
13	Menurunnya kasus kesakitan dan kematian	Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Penemuan Kasus	58	82,79

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	Capaian (%)
				2020	2020
	akibat penyakit menular dan tidak menular		(CDR) TBC		

BAB III

RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2020

A. Visi dan Misi

Provinsi Lampung memiliki visi “ *Rakyat Lampung Berjaya* ”

Dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, akan dicapai melalui 6 (enam) misi, dimana OPD Dinas Kesehatan berkontribusi kedalam Misi yang ketiga yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas”, dengan tujuan yang keempat yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat) dengan indikator sasaran meningkatnya angka harapan hidup (AHH) menjadi 72,48 pada tahun 2024. Di samping itu pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menjawab Agenda Kerja Gubernur Lampung ke-11 dan ke-14 :

Agenda Kerja ke-11 “Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)”, dengan:

- a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
- b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
- c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak
- d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik
- e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak
- f. Memberikan insentif untuk kader-kader posyandu

Agenda Kerja ke-14 “Lampung Sehat” :

- a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas
 - b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit
- Selain itu OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendukung upaya penerapan SPM Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu :
- 1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga berkontribusi dalam pencapaian indikator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada *goals* 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dan *goals* 6 air bersih dan sanitasi layak.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendukung prioritas Pembangunan Daerah (PD 1) yaitu Pembangunan SDM dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat) dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1) Menurunnya kasus kematian Ibu; 2) Menurunnya kasus kematian bayi; 3) Meningkatkan status gizi masyarakat; 4) Menurunnya kasus kesakitan; yang ditandai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kasus Kematian Ibu 110 kasus pada tahun 2024
- 2) Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) 520 kasus pada tahun 2024
- 3) Prevalensi Stunting 16,78% pada tahun 2024
- 4) Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (success rate) 90% pada tahun 2024

C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sesuai dengan Renstra OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus kematian Ibu;
- 2) Menurunnya kasus kematian bayi;
- 3) Meningkatkan status gizi masyarakat;
- 4) Menurunnya kasus kesakitan;

dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kasus Kematian Ibu 130 kasus pada tahun 2020
- 2) Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) 600 kasus pada tahun 2020
- 3) Prevalensi Stunting 25,18% pada tahun 2020
- 4) Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (success rate) 90% pada tahun 2020

D. Rencana Aksi atas Kinerja tahun 2021

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kinerja pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan rencana aksi tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 INDIKATOR SASARAN & PROGRAM OPD DINAS KESEHATAN TAHUN 2021

KODE REKENING	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	TARGET 2021
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alokasi Anggaran di APBD	5 Urusan kantor
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah layanan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5 dokumen
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan	12 Bulan

		Pengelolaan Keuangan	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	415 org/Tahun
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah layanan pelaksanaan verifikasi	1 dokumen
5.1.05.05.04	Belanja Hibah	Tersedianya Biaya Operasional PMI dan Yayasan Jantung Sehat	2 layanan
5.1.05.05.04.01	Belanja Hibah PMI	Tersedianya Biaya Operasional PMI	1 layanan
5.1.05.05.04.02	Belanja Hibah Yayasan Jantung Sehat	Tersedianya Biaya Operasional Yayasan Jantung Sehat	1 layanan
5.1.05.05.04.03	Belanja Hibah untuk IAKMI	Tersedianya Biaya Operasional IAKMI	1 layanan
1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen laporan Penyusunan Akutansi dan pelaporan keuangan	1 dokumen
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/semester	Jumlah Laporan Keu Bulanan/Semesteran	1 dokumen
1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
1.02.01.1.05.01	Peningkatan dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan
1.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Kinerja Pegawai	1 Dokumen
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	6 Orang
1.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi	1 Laporan
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	12 Bulan
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	Tersedianya Peralatan	12 Bulan

	Tangga	Rumah Tangga	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Layanan Pengadaan Mebel	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Layanan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit Kerja
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Unit Kerja
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit Kerja
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	12 Bulan

1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Unit Kerja
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Layanan Pengadaan Mebel	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Layanan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit Kerja
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Unit Kerja
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit Kerja
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	5 Unit Kerja

		Bangunan Lainnya	
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit Kerja
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi wasting	7,99%
		FKTP Terakreditasi	55%
		Penemuan Kasus (CDR) TBC	65%
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5 unit kerja
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah layanan Pengembangan Rumah Sakit	2 paket
1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah layanan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Layanan
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis telemedicine, dll)	Jumlah Layanan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan bergerak, gugus Pulau, pelayanan Kesehatan berbasis Telemedicine, dll)	2 paket
1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas Kesehatan lainnya yang direhabilitasi/pemeliharaan	1 unit kerja
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah RS yang direhabilitasi/pemeliharaan	1 RS
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Paket Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4 Paket
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Layanan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	4 Layanan
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Paket Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan dan Pemeliharaan	1 paket
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Paket Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1 paket

1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Layanan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3 layanan
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	<u>12 Bulan</u>
1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	<u>12 Bulan</u>
1.02.02.1.01.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 layanan
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah layanan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan, Minuman,serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 layanan
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	% Ketersediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5 Unit Kerja
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	% Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Bidang Kesehatan Provinsi)	100%
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	% pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa/KLB Provinsi	100%
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Layanan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 layanan

1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Layanan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<u>4 layanan</u>
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Layanan Promosi Kesehatan	1 layanan
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 layanan
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Haji	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	1 layanan
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40 % populasi	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 layanan
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Kesehatan	15 Kab/Kota
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 layanan
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5 layanan
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah layanan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 layanan
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 layanan
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 RS
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat	1 layanan

		Terpadu (SPGDT)	
1.02.02.1.02.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Layanan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	1 layanan
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen yang dirujuk	1 layanan
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Jumlah layanan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	1 layanan
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 layanan
1.02.02.1.02.28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	5 dokumen
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya layanan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 paket
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Publikasi Data dan Informasi kesehatan	1 layanan
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Informasi Kesehatan	5 layanan
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3 Layanan
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Layanan
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah layanan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	1 Layanan
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah layanan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Layanan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Puskesmas yang memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif	35%
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Tersedianya Laporan layanan pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	2 Layanan
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Layanan

1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah layanan distribusi SDM Kesehatan	1 Layanan
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2 Layanan
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten dan terampil	60%
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen laporan binwas	1 Layanan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Layanan Kefarmasian	2 Layanan
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Tersedianya layanan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	2 Layanan
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah layanan Penyediaan dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	1 Layanan
1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah layanan Penyediaan dan Pengelolaan data Perizinan Pengakuan PBF Cab dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	1 Layanan
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Tersedianya Layanan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	2 Layanan
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah layanan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1 Layanan
1.02.04.1.02.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah layanan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	1 Layanan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tersedianya Layanan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2 Layanan

1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Layanan
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya layanan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Layanan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1 Layanan
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan PHBS	1 Layanan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1 layanan
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 layanan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2021 diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 agar kiranya pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan terorganisir serta untuk memudahkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Proses penyusunan Rencana Aksi ini dilakukan dengan melibatkan para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang kemudian dikoordinasikan oleh Seksi Penyusunan Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dengan tersusunnya Rencana Aksi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

LAMPIRAN

